

MODEL MANAJEMEN *PLANNING, ORGANIZING, MONITORING* DAN *EVALUATING* (POIME) DALAM PEMENUHAN DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN JAWA BARAT)

Romi Siswanto^{1*}, Achmad Anwar Abidin², Kadarisman³, Fitra Jaya⁴, Sucipto⁵, Yati⁶

Universitas Terbuka¹²³⁴⁵⁶, Indonesia

*romi.siswanto@ecampus.ut.ac.id

Corresponding Author: Romi Siswanto

How to cite this article: Siswanto, R., Abidin, A. A., Kadarisman, Jaya, F., Sucipto & Yati. "Model Manajemen *Planning, Organizing, Monitoring* dan *Evaluating* (POIME) dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar (Studi Kasus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat)". *Jurnal Kependidikan Islam*. Vol. 15, No. 1 (February, 28, 2025): 34-43.
<https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/JKPI/article/view/4052>.

Abstract

This study aims to examine the implementation of the POIME management model (Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, and Evaluating) in elementary schools located in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) and West Java in order to support the fulfillment of the Eight National Education Standards (SNP). Using a mixed-method approach, the study combines a quantitative survey involving 98 school principals and qualitative interviews to explore the factors influencing the effectiveness of POIME implementation. The findings indicate that West Java, with its better infrastructure and stronger community involvement, implements POIME more effectively. In contrast, resource constraints, such as inadequate facilities and lower community participation, limit its effectiveness in NAD. Socio-cultural and geographical factors also play a critical role in determining the success of POIME in both regions. The study highlights the importance of local community engagement and resource availability in improving educational management. Recommendations for future research include investigating the socio-cultural dynamics that influence POIME implementation and conducting long-term impact evaluations to measure its effectiveness over time. Additionally, the study offers practical suggestions to enhance the role of school leadership and community involvement in supporting the achievement of the Eight National Education Standards in both regions..

Keyword: POIME Management, National Education Standards, Elementary Schools, Nanggroe Aceh Darussalam, West Java

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model manajemen POIME (Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, Evaluating) dalam mendukung pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah dasar yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu survei kuantitatif yang melibatkan 98 kepala sekolah dan wawancara kualitatif untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan POIME. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan POIME lebih efektif di Jawa Barat, didukung oleh infrastruktur yang lebih baik dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Sebaliknya, di NAD, efektivitas penerapannya terbatas oleh keterbatasan sumber daya, seperti fasilitas yang kurang memadai dan partisipasi masyarakat yang rendah. Faktor sosial-budaya dan geografis juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan POIME di kedua wilayah. Penelitian ini menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan ketersediaan sumber daya dalam

Model Manajemen *Planning, Organizing, Monitoring* dan *Evaluating* (POIME) dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar (Studi Kasus Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat) *meningkatkan manajemen pendidikan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup penyelidikan lebih lanjut tentang dinamika sosial-budaya yang mempengaruhi penerapan POIME dan evaluasi dampak jangka panjang untuk mengukur efektivitasnya seiring waktu. Selain itu, saran praktis diberikan untuk meningkatkan peran kepemimpinan sekolah dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pencapaian Delapan Standar Nasional Pendidikan di kedua wilayah tersebut.*

Kata Kunci: Manajemen POIME, Standar Nasional Pendidikan, Sekolah Dasar, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di tingkat global. Namun, dalam upaya memenuhi Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), tantangan yang signifikan masih sering dihadapi, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik sosial-budaya dan geografis yang kompleks, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pendidik, menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pencapaian SNP yang diharapkan.¹ Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan manajemen yang lebih sistematis dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Model manajemen berbasis POIME (*Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, and Evaluating*) telah diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah dalam mencapai SNP. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan POIME dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan dan pengorganisasian yang lebih baik.² Namun, implementasi model ini belum merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil yang menghadapi tantangan spesifik. Kajian yang ada cenderung berfokus pada penerapan kebijakan pendidikan secara umum tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana POIME dapat diterapkan secara efektif dalam pemenuhan SNP. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan POIME dalam mendukung pemenuhan SNP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan model manajemen POIME dapat mendukung pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di sekolah dasar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan POIME, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial-budaya, geografis, dan keterbatasan sumber daya di dua provinsi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam mengelola sekolah dengan pendekatan POIME serta kontribusi mereka terhadap pencapaian Delapan Standar Nasional Pendidikan. Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu: bagaimana penerapan model manajemen POIME berkontribusi dalam pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di sekolah dasar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat? Apa saja faktor-faktor sosial-budaya dan geografis yang mempengaruhi efektivitas penerapan POIME dalam memenuhi SNP di dua provinsi tersebut? Bagaimana peran kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam penerapan model POIME berkontribusi terhadap pencapaian SNP?

¹ Amelia, A. (2023). Penerapan Standar Nasional Pendidikan Di SDN Kampung Krueng Kabupaten Nagan Raya. *Pionir Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.22373/pjp.v12i3.21361>

² Fatia, S., Safitri, A. H., Nur Khamidatullailiyah, Y. G., Yaqin, M. A., & Fauzan, Abd. C. (2022). Pemodelan Proses Bisnis Organisasi Sekolah Berbasis Work Breakdown Structure Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. *Ilkomnika Journal of Computer Science and Applied Informatics*. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v4i2.147>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan. Pertama, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan model manajemen POIME dapat membantu sekolah-sekolah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat dalam memenuhi Delapan Standar Nasional Pendidikan. Kedua, penelitian ini akan menyediakan informasi mengenai faktor-faktor sosial-budaya, geografis, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan penerapan POIME, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan sekolah di daerah dengan kondisi serupa. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai peran strategis kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam manajemen berbasis POIME untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah dan pencapaian standar pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan sekolah di daerah-daerah yang menghadapi tantangan khusus, seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan di berbagai daerah lainnya dengan kondisi serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu pendekatan yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan POIME dalam pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat. Metode mixed method ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari perspektif kualitatif, sekaligus memastikan validitas hasil melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif.³ Kombinasi ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas penerapan POIME di lapangan, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dari bulan April hingga Juni 2023. Populasi penelitian terdiri dari sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, di mana 20 sekolah dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti penerapan POIME dalam manajemen sekolah dan keterlibatan aktif dalam program peningkatan kualitas pendidikan. Sampel penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, serta komite sekolah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan.⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penyebaran kuesioner⁵. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah dan guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses penerapan POIME dalam manajemen sekolah, serta kendala yang dihadapi. Instrumen wawancara dikembangkan berdasarkan teori manajemen pendidikan dan validitasnya diuji melalui proses uji coba. Selain itu, observasi dilakukan di sekolah-sekolah yang menjadi sampel untuk melihat langsung bagaimana POIME diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah.⁶ Kuesioner disebarkan kepada seluruh responden untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai tingkat pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan dan bagaimana pengaruh penerapan POIME terhadap standar tersebut. Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis tematik berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles, 1994. Data wawancara dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan penerapan POIME di sekolah. Setelah itu, data kuantitatif yang diperoleh melalui

³ Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research Third Edition*.

⁴ Fraenkel, J. R., W. N. E., & H. H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education*.

⁵ Miles, M. B., & H. A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.

⁶ Cohen, L., M. L., & M. K. (2018). *Research Methods in Education*.

Model Manajemen *Planning, Organizing, Monitoring* dan *Evaluating* (POIME) dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar (Studi Kasus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat) kuesioner dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi linier untuk mengukur sejauh mana penerapan POIME berkontribusi terhadap pencapaian Delapan Standar Nasional Pendidikan. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk memperkuat temuan dari analisis kualitatif, serta memberikan bukti empiris tentang hubungan antara penerapan POIME dan kualitas pendidikan.⁷ Untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, uji coba dilakukan terhadap 10 responden di luar sampel penelitian utama. Validitas instrumen diuji menggunakan validitas isi, di mana pakar pendidikan memberikan masukan mengenai kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian. Sementara itu, reliabilitas instrumen diuji dengan teknik Cronbach's Alpha, yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari item-item kuesioner.⁸ Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi, dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0.7. Secara keseluruhan, metode mixed method ini dipilih untuk memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami fenomena penerapan POIME dalam manajemen pendidikan. Penggabungan data kualitatif dan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami konteks, tetapi juga mengevaluasi secara objektif sejauh mana penerapan POIME mendukung pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan manajemen pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang unik.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Kuantitatif

Penelitian ini melibatkan 98 kepala sekolah dari dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hasil penelitian ini menggambarkan distribusi responden berdasarkan jenis satuan pendidikan dan penggunaan kurikulum yang diterapkan di masing-masing provinsi.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Responden berdasarkan Satuan Pendidikan

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JABAR	NAD	JUMLAH
1	MI NEGERI	1	20	21
2	MI SWASTA	15	3	18
3	SD SWASTA	1	3	4
4	SDN NEGERI	32	23	55
JUMLAH		49	49	98

Analisis dari Tabel 1, 98 kepala sekolah yang menjadi responden, distribusi responden tersebar rata antara Jawa Barat dan NAD dengan masing-masing 49 satuan pendidikan. Jenis satuan pendidikan yang paling banyak diwakili adalah SD Negeri, dengan total 55 sekolah (32 di Jawa Barat dan 23 di NAD). MI Swasta memiliki representasi yang lebih besar di Jawa Barat (15 sekolah) dibanding NAD (3 sekolah), sedangkan MI Negeri mendominasi di NAD dengan 20 sekolah. Partisipasi SD Swasta di kedua provinsi relatif rendah, dengan total hanya 4 sekolah (1 di Jawa Barat dan 3 di NAD). Seperti yang dijelaskan oleh Firman (2018), penelitian kuantitatif sering kali memperlihatkan pola sebaran yang berbeda berdasarkan

⁷ Fraenkel, J. R., W. N. E., & H. H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education*.

⁸ Nunnally, J. C., & B. I. H. (1994). *Psychometric Theory*.

⁹ Sukmono, F. G., Loilatu, M. J., & Fadila, Q. Y. (2021). Pemberitaan Sriwijaya Air 182 Dalam Perspektif Jurnalisme Optimis Dan Air Mata. *Jurnal Kajian Komunikasi*.

<https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.32387>

kondisi sosial dan kebijakan di setiap provinsi, yang tampak dalam perbedaan antara jumlah sekolah negeri dan swasta pada dua provinsi ini.¹⁰

Tabel 2. Rekapitulasi Propinsi Pengguna Kurikulum

NO	PROPINSI	KTSP	K-13	IKM	JUMLAH
1	JAWA BARAT	1	20	28	49
2	NAD	1	18	30	49
Jumlah		2	38	58	98

Analisis Tabel 2, penggunaan kurikulum di dua provinsi menunjukkan bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) mendominasi, dengan 58 satuan pendidikan (28 di Jawa Barat dan 30 di NAD) yang telah mengadopsinya. Kurikulum 2013 (K-13) masih digunakan oleh 38 sekolah, sementara KTSP hanya diterapkan di 2 sekolah (masing-masing 1 di Jawa Barat dan NAD). Data ini menunjukkan bahwa IKM telah menjadi kurikulum yang paling banyak digunakan, menggantikan KTSP dan K-13, yang sesuai dengan temuan Mariatun (2022) bahwa implementasi kurikulum baru sering kali bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sementara itu, Arliani (2021) menjelaskan bahwa perubahan kurikulum mempengaruhi hasil belajar siswa, terutama ketika satuan pendidikan beralih ke kurikulum yang lebih modern seperti IKM. Penemuan ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al. (2023), yang menekankan pentingnya kebijakan pendidikan berbasis data dalam pengelolaan satuan pendidikan. Dalam konteks usaha untuk meningkatkan efektivitas kurikulum di berbagai wilayah, studi dari Pabate & Fallo (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keberhasilan.¹¹

2. Kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap sekolah-sekolah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Barat, penerapan model manajemen POIME (*Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, Evaluating*) dalam mendukung pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan menunjukkan variasi efektivitas di kedua provinsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model manajemen POIME diimplementasikan di tingkat sekolah dasar, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan model ini, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial-budaya, geografis, serta keterbatasan sumber daya. Pada tahap perencanaan, sekolah-sekolah di Jawa Barat dan NAD menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana difokuskan pada pengembangan Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah dan tim manajemen di sebagian besar sekolah berupaya mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang berbasis proyek ini. Meski demikian, beberapa sekolah di NAD menghadapi kendala besar dalam hal perencanaan, terutama karena keterbatasan sumber daya keuangan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program sekolah. Keterbatasan sumber daya, terutama finansial, sering menjadi hambatan dalam penyusunan anggaran sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Di sekolah-sekolah pedalaman NAD, proses perencanaan juga terkendala oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang mekanisme anggaran berbasis kinerja, yang merupakan salah satu pilar dari penerapan Kurikulum Merdeka.¹²

¹⁰ Firman, F.-. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e>

¹¹ Pabate, A. R., & Fallo, Y. M. (2019). Analisis Pendapatan Usaha Kudapan Di Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara (Study Kasus Warung Restu Bunda). *Agrimor*. <https://doi.org/10.32938/ag.v4i2.598>

¹² Nurfadilah, A. (2024). Nilai Moral Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Alfabeta Jurnal Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*. <https://doi.org/10.33503/alfabeta.v7i1.3984>

Model Manajemen *Planning, Organizing, Monitoring* dan *Evaluating* (POIME) dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar (Studi Kasus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat)

Tahap pengorganisasian di sekolah-sekolah ini ditandai dengan upaya distribusi tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan komite sekolah. Pengorganisasian di Jawa Barat umumnya berjalan lebih baik dibandingkan NAD, dengan partisipasi guru dan komite sekolah yang lebih tinggi. Di Jawa Barat, komite sekolah berperan aktif dalam membantu sekolah menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan program-program berbasis proyek yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Namun, di beberapa wilayah NAD, keterlibatan komite sekolah dan masyarakat setempat masih sangat minim, terutama di daerah pedalaman. Ini sesuai dengan temuan Amaliya et al. (2022), yang menyatakan bahwa dukungan masyarakat terhadap program-program pendidikan seringkali rendah di wilayah dengan karakter sosial-budaya yang konservatif. Selain itu, komitmen dari pihak sekolah untuk melibatkan komite dan orang tua juga masih kurang optimal, sehingga proses pengorganisasian seringkali dilakukan secara top-down tanpa partisipasi yang cukup dari masyarakat sekitar. Pada tahap pelaksanaan, sekolah-sekolah di Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dibandingkan NAD. Di Jawa Barat, implementasi model POIME dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Guru-guru di sekolah ini secara aktif menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang dianjurkan dalam Kurikulum Merdeka, sementara kepala sekolah bertindak sebagai penggerak yang memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana.¹³ Namun, di NAD, pelaksanaan sering terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Sarajar (2023), sekolah-sekolah di NAD sering kali kekurangan fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan, seperti laboratorium, ruang kelas yang memadai, dan perangkat teknologi. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru dalam menerapkan kurikulum berbasis proyek juga menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Bahkan, beberapa kepala sekolah di NAD melaporkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka sering tertunda akibat perubahan kebijakan pendidikan yang cepat dan kurangnya kesiapan sumber daya sekolah.

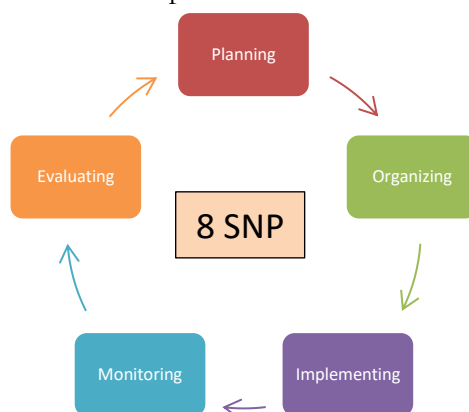
Monitoring terhadap penerapan model manajemen POIME di sekolah-sekolah ini dilakukan melalui pelaporan berkala dan evaluasi internal yang diawasi oleh kepala sekolah dan pihak dinas pendidikan setempat. Sekolah-sekolah di Jawa Barat lebih maju dalam hal penerapan sistem monitoring berbasis teknologi, yang memungkinkan sekolah untuk mencatat penggunaan anggaran dan capaian program secara real-time. Di beberapa sekolah di perkotaan Jawa Barat, pengawasan dilakukan secara digital, yang mempermudah pelacakan dan akuntabilitas penggunaan dana sekolah. Sebaliknya, di NAD, mekanisme monitoring ini masih bersifat manual dan terkendala oleh kurangnya akses terhadap teknologi. Seperti yang dijelaskan oleh Sukmono et al. (2021), keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil sangat mempengaruhi efektivitas monitoring, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan evaluasi program-program sekolah.¹⁴

Pada tahap evaluasi, sekolah-sekolah di kedua provinsi ini melakukan penilaian terhadap capaian masing-masing standar pendidikan. Di Jawa Barat, evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah berhasil memenuhi standar pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, dan penilaian berbasis proyek yang menjadi indikator utama dalam Kurikulum Merdeka. Namun, di NAD, hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak sekolah masih tertinggal dalam memenuhi standar sarana dan prasarana serta standar tenaga kependidikan. Beberapa sekolah di NAD melaporkan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam merekrut guru yang kompeten dan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak,

¹³ Itje, T. (2023). Dampak Implementasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Kualitas Pembelajaran. *Matheteno Religious Studies*. <https://doi.org/10.52960/m.v3i1.165>

¹⁴ Amaliya, R., Wulandari, P., & Komariah, S. (2022). Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Masa Panen Kopi Di Desa Tongkok, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.279-292>

seperti perpustakaan dan laboratorium. Ini sesuai dengan temuan yang menyatakan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam mencapai Delapan Standar Nasional Pendidikan adalah kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran di daerah-daerah terpencil.



Gambar 1. POIME dalam Delapan Standar Nasional Pendidikan

Secara keseluruhan, penerapan model manajemen POIME di sekolah-sekolah di Jawa Barat dan NAD masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial-budaya yang berbeda di kedua provinsi ini.¹⁵ Di Jawa Barat, penerapan POIME lebih efektif berkat dukungan infrastruktur yang lebih baik dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Di NAD, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam mendukung program-program pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur di sekolah-sekolah di NAD, serta memperkuat koordinasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah agar penerapan model manajemen POIME dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di kedua provinsi tersebut.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, kami menganalisis penerapan model manajemen POIME (Planning, Organizing, Implementing, Monitoring, Evaluating) dalam mendukung pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah dasar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Barat (Jabar¹⁶). Pembahasan ini didasarkan pada data hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah diolah dari responden kepala sekolah di kedua provinsi tersebut.

1. Penerapan Model POIME dan Delapan Standar Nasional Pendidikan

Dari hasil penelitian kuantitatif yang mengacu pada rekapitulasi data berdasarkan satuan pendidikan dan penggunaan kurikulum, ditemukan bahwa di kedua provinsi, penerapan kurikulum mendominasi dalam bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Tabel menunjukkan bahwa IKM diadopsi oleh mayoritas sekolah baik di Jawa Barat maupun NAD, dengan jumlah total 58 sekolah yang telah menggunakan kurikulum ini. Data ini menegaskan bahwa IKM telah menjadi pilihan utama dalam pengelolaan pembelajaran di banyak sekolah, menggantikan Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang kini semakin jarang digunakan.

¹⁵ Arliani, Y. (2021). Korelasi Antara Sikap Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fisika. *Sch. Jo. Phs. Ed.* <https://doi.org/10.37251/sjpe.v2i3.471>

¹⁶ Mariatun, S. (2022). Implementasi Model Inquiry Learning Dalam Pembelajaran Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas IX MTs Al-Falah Pancardao Lombok Tengah NTB. *Jser.* <https://doi.org/10.62759/jser.v1i1.8>

Model Manajemen *Planning, Organizing, Monitoring* dan *Evaluating* (POIME) dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar (Studi Kasus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat)

Penemuan ini mendukung penelitian Arliani (2021), yang menunjukkan bahwa kurikulum baru yang berbasis proyek seperti IKM membantu meningkatkan hasil pembelajaran.

Dari sisi kualitatif, penerapan model manajemen POIME sangat berpengaruh pada kemampuan sekolah dalam memenuhi Delapan SNP, terutama dalam konteks perencanaan dan implementasi kurikulum yang berkaitan dengan standar pembelajaran dan standar penilaian. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah di kedua provinsi memiliki peran penting dalam menyusun rencana anggaran untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, sesuai dengan anjuran dalam IKM. Namun, sekolah di NAD lebih banyak menghadapi hambatan terkait alokasi anggaran yang kurang memadai dan kurangnya partisipasi komite sekolah dalam proses perencanaan, yang menghambat pemenuhan standar pengelolaan dan pembiayaan.¹⁷

2. Faktor Penghambat dalam Penerapan Model POIME

Berdasarkan hasil kualitatif, salah satu faktor penghambat utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya di kedua provinsi, meskipun lebih parah di NAD. Sekolah-sekolah di NAD, terutama di wilayah pedalaman, melaporkan bahwa kurangnya akses ke sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur teknologi membuat penerapan POIME sulit diimplementasikan secara efektif. Banyak sekolah di NAD juga mengalami kesulitan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana serta standar tenaga kependidikan. Misalnya, beberapa sekolah masih kekurangan tenaga pengajar yang terlatih dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek, yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka. Ini sejalan dengan temuan, yang menyebutkan bahwa keterbatasan fasilitas dan sumber daya di daerah pedalaman seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kendala yang dihadapi lebih terkait dengan adaptasi terhadap kebijakan pendidikan yang terus berubah. Meskipun sekolah-sekolah di Jabar memiliki infrastruktur yang lebih baik, perubahan kebijakan yang cepat menyebabkan proses pengorganisasian sering kali menjadi rumit. Guru dan kepala sekolah perlu terus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat, yang kadang-kadang mempengaruhi stabilitas dalam penerapan kurikulum di tingkat sekolah. Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pelatihan guru juga menjadi tantangan dalam implementasi ini.

3. Tantangan dalam Implementasi dan Monitoring

Tahap implementasi model manajemen POIME dalam pemenuhan Delapan SNP sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di setiap daerah. Di Jawa Barat, implementasi berjalan cukup lancar berkat dukungan dari teknologi yang memadai. Sebagian besar sekolah telah mengadopsi teknologi digital dalam proses pengajaran dan pelaporan, terutama dalam monitoring dan evaluasi penggunaan dana sekolah. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan transparan terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Jabar cenderung lebih mampu memenuhi standar pengelolaan dan penilaian karena mereka telah menggunakan sistem monitoring yang berbasis teknologi. Ini mendukung temuan, yang menekankan pentingnya infrastruktur teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan sekolah. Mekanisme monitoring di NAD masih banyak yang bersifat manual, terutama di daerah-daerah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital. Ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan evaluasi capaian

¹⁷ Ramadhani, W., Mustakim, M., & Muis, A. (2023). Analisis Ketersediaan Lahan Terbuka Hijau Bagi Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Tempe KAB.WAJO Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig). *Karajata*. <https://doi.org/10.31850/karajata.v3i1.2066>

sekolah terhadap SNP, yang pada akhirnya menghambat proses perbaikan berkelanjutan yang diperlukan. Monitoring yang tidak optimal ini juga mengakibatkan rendahnya capaian standar sarana prasarana, di mana beberapa sekolah tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak dan peralatan laboratorium yang memadai.

4. Evaluasi dan Peran Kepala Sekolah serta Guru

Evaluasi terhadap keberhasilan penerapan model POIME di sekolah-sekolah di kedua provinsi ini menunjukkan hasil yang bervariasi. Di Jawa Barat, evaluasi terhadap pencapaian SNP, terutama standar pembelajaran dan standar kelulusan, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sekolah-sekolah di provinsi ini telah berhasil mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis proyek dengan lebih baik, sehingga mendukung pencapaian hasil belajar siswa yang lebih baik pula. Peran kepala sekolah dalam mengarahkan guru dan mengelola sumber daya menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Hal ini konsisten dengan temuan Nurfadilah (2024), yang menyebutkan bahwa kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah dapat mempengaruhi pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun, di NAD, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada banyak kendala dalam mencapai SNP, terutama standar sarana dan prasarana, serta standar tenaga kependidikan. Kekurangan dalam sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan yang memadai menghambat sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Kepala sekolah di NAD sering kali harus bekerja keras dengan keterbatasan yang ada untuk memastikan bahwa program pendidikan dapat berjalan dengan baik. Namun, keterbatasan ini membuat banyak sekolah tertinggal dalam pemenuhan SNP.

Selain itu, komite sekolah di NAD dilaporkan kurang aktif dalam mendukung program-program sekolah, terutama dalam hal penggalangan dana dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Sebaliknya, di Jawa Barat, komite sekolah lebih terlibat aktif dalam mendukung manajemen sekolah, terutama dalam membantu sekolah memenuhi kebutuhan infrastruktur dan program-program tambahan yang mendukung pembelajaran siswa.¹⁸ Penerapan model manajemen POIME di kedua provinsi ini menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, geografis, dan keterbatasan sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas penerapan. Di Jawa Barat, dengan dukungan infrastruktur dan partisipasi masyarakat yang lebih baik, penerapan POIME berhasil meningkatkan pencapaian SNP, terutama dalam hal standar pembelajaran dan pengelolaan. Sebaliknya, di NAD, keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama dalam penerapan model ini. Keterbatasan infrastruktur di NAD juga membuat proses monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang menyebabkan keterlambatan dalam perbaikan berkelanjutan terhadap program-program pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah dan pihak sekolah di NAD untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan. meskipun penerapan POIME DI Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, upaya untuk memperkuat adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang cepat juga diperlukan agar pencapaian SNP dapat terus meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa model manajemen POIME efektif dalam mendukung pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi Jawa Barat, sementara di Nanggroe

¹⁸ Sarajar, M. (2023). Tari Sebagai Kegiatan Untuk Meringankan Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *JPendTar*. <https://doi.org/10.21009/jpt.417>

Model Manajemen *Planning, Organizing, Monitoring* dan *Evaluating* (POIME) dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar (Studi Kasus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Jawa Barat) Aceh Darussalam (NAD) efektivitasnya terbatas karena kendala sumber daya dan infrastruktur. Penerapan POIME di sekolah-sekolah yang memiliki dukungan finansial, teknologi, dan pelatihan yang memadai cenderung berjalan lebih baik. Berdasarkan hasil ini, rekomendasi untuk penelitian di masa depan adalah melakukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh budaya lokal dan partisipasi masyarakat terhadap penerapan POIME, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, studi masa depan juga perlu fokus pada evaluasi dampak jangka panjang penerapan model ini terhadap kinerja sekolah. Batasan penelitian ini adalah keterbatasan dalam pengumpulan data dari daerah-daerah terpencil yang sulit diakses, yang mengakibatkan adanya kekurangan informasi yang mendetail dari beberapa sekolah di wilayah pedalaman NAD. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup evaluasi jangka pendek, sehingga dampak jangka panjang dari penerapan POIME belum bisa dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar cakupan wilayah diperluas ke daerah-daerah lain yang mungkin memiliki dinamika sosial-budaya yang berbeda, serta dilakukan studi longitudinal untuk menilai efek jangka panjang dari penerapan model manajemen POIME terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, R., Wulandari, P., & Komariah, S. (2022). Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Masa Panen Kopi Di Desa Tongkok, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.279-292>
- Amelia, A. (2023). Penerapan Standar Nasional Pendidikan Di SDN Kampung Krueng Kabupaten Nagan Raya. *Pionir Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.22373/pjp.v12i3.21361>
- Arliani, Y. (2021). Korelasi Antara Sikap Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fisika. *Sch. Jo. Phs. Ed*. <https://doi.org/10.37251/sjpe.v2i3.471>
- Cohen, L. , M. L. , & M. K. (2018). *Research Methods in Education*.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research Third Edition*.
- Fatia, S., Safitri, A. H., Nur Khamidatullailiyah, Y. G., Yaqin, M. A., & Fauzan, Abd. C. (2022). Pemodelan Proses Bisnis Organisasi Sekolah Berbasis Work Breakdown Structure Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. *Ilkomnika Journal of Computer Science and Applied Informatics*. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v4i2.147>
- Firman, F.-. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e>
- Fraenkel, J. R. , W. N. E. , & H. H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education*.
- Itje, T. (2023). Dampak Implementasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Kualitas Pembelajaran. *Matheteno Religious Studies*. <https://doi.org/10.52960/m.v3i1.165>
- Mariatun, S. (2022). Implementasi Model Inquiry Learning Dalam Pembelajaran Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas IX MTs Al-Falah Pancordao Lombok Tengah NTB. *Jser*. <https://doi.org/10.62759/jser.v1i1.8>
- Miles, M. B. , & H. A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Nunnally, J. C. , & B. I. H. (1994). *Psychometric Theory*.
- Nurfadilah, A. (2024). Nilai Moral Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Alfabeta Jurnal Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*. <https://doi.org/10.33503/alfabeta.v7i1.3984>
- Pabate, A. R., & Fallo, Y. M. (2019). Analisis Pendapatan Usaha Kudapan Di Desa Humusu Wini Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara (Study Kasus Warung Restu Bunda). *Agrimor*. <https://doi.org/10.32938/ag.v4i2.598>
- Ramadhani, W., Mustakim, M., & Muis, A. (2023). Analisis Ketersediaan Lahan Terbuka Hijau Bagi Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Tempe KAB.WAJO Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig). *Karajata*. <https://doi.org/10.31850/karajata.v3i1.2066>
- Sarajar, M. (2023). Tari Sebagai Kegiatan Untuk Meringankan Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *JPendTar*. <https://doi.org/10.21009/jpt.417>
- Sukmono, F. G., Loilatu, M. J., & Fadila, Q. Y. (2021). Pemberitaan Sriwijaya Air 182 Dalam Perspektif Jurnalisme Optimis Dan Air Mata. *Jurnal Kajian Komunikasi*. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.32387>